

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *critical discourse analysis* (CDA). Apabila di Indonesiakan, istilah tersebut dikenal dengan sebutan analisis wacana kritis (AWK). Dalam sejarah ilmu metodologi dalam ilmu-ilmu sosial, metode CDA sendiri sebenarnya belum begitu lama dikenal. CDA baru dikenal dan menemukan bentuknya sebagai sebuah ilmu metodologi saat beberapa akademisi berkumpul di Universitas Amsterdam pada tahun 1991. Saat itu tokoh-tokoh seperti Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen dan Ruth Wodak berkumpul bersama selama dua hari untuk mendiskusikan hingga merumuskan teori dan metode CDA. Mereka saling berhadapan satu sama lain dengan pendekatannya masing-masing. Dalam pertemuan tersebut terungkap tentang persamaan dan perbedaan terhadap teori dan metode dalam CDA. Peristiwa penting lainnya yang juga menandai lahir dan perkembangan CDA adalah dengan diluncurkannya jurnal "*Discourse and Society*" karya Teun van Dijk (1990), buku "*Language and Power*" karya Norman Fairclough (1989), buku "*Language, Power and Ideology*" karya Ruth Wodak (1989) serta ditambah lagi dengan buku pertama Teun van Dijk (1984) tentang rasisme yang berjudul "*Prejudice in Discourse: an Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Conversation*" (dalam Wodak dan Meyer, 2001, hlm. 4).

Berdasarkan penelusuran karya dari tokoh-tokoh yang mempopulerkan CDA tersebut, diperoleh pengertian tentang metode CDA; (1) menurut Wodak (2001, hlm. 2) CDA dapat diartikan sebagai analisis hubungan struktural yang bersifat samar-samar ataupun transparan tentang adanya dominasi, diskriminasi dan kontrol kekuasaan yang diwujudkan dalam penggunaan bahasa. Dengan kata lain, bahasa bagi Wodak merupakan media dominasi dan kekuatan sosial yang berfungsi untuk melegitimasi hubungan kekuasaan yang terorganisir. Dalam kaitannya dengan hubungan kekuasaan berarti bahasa juga merupakan instrumen yang bersifat ideologis. Selanjutnya, (2) menurut Fairclough (2003, hlm. 19) CDA atau yang ia

kenal dengan sebutan *critical language study* (CLS) atau kajian bahasa kritis merupakan sebuah metode yang menempatkan wacana atau bahasa (pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan) sebagai bentuk praktik sosial. Bahasa sebagai bentuk praktik sosial baginya ditentukan oleh struktur sosial yang ada. Terdapat juga hubungan antara bahasa dan kekuasaan, dan hubungan bahasa dengan ideologi. Berdasarkan keyakinannya, bahasa dalam masyarakat secara sentral memiliki kekuatan, dan merupakan sarana untuk pencapaian suatu kekuasaan serta memiliki ideologi sendiri. Sedangkan menurut van Dijk (2008, hlm. 85) CDA adalah salah satu jenis penelitian analisis wacana yang pokok utamanya mempelajari tentang cara penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi dan pemberlakuan ketidaksetaraan (*inequality*) yang kemudian harus dilakukan perlawanan dengan cara memproduksi ulang teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. CDA termasuk kategori penelitian pembangkangan di mana para analisis wacana kritis mengambil posisi berseberangan sehingga dapat memahami, mengungkap, dan pada akhirnya menolak kesenjangan sosial yang terjadi dan berhasil diungkap.

Berdasarkan dari deskripsi-deskripsi di atas, Eriyanto (2017, hlm. 6) kemudian menyimpulkan kalau CDA adalah sebuah metode yang berfokus pada penguraian makna dan nilai yang terkandung dalam penggunaan bahasa. Menurut metode ini, bahasa bukanlah sesuatu yang bebas nilai (netral), menggambarkan realitas apa adanya ataupun hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, melainkan bahasa juga berperan sebagai instrumen politik yang membawa pesan-pesan ideologis sebagai wujud dari praktek kekuasaan. Metode CDA sering digunakan sebagai pendekatan untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa.

Menurut Haryatmoko (2017, hlm. v-vi) setidaknya terdapat empat alasan mengapa metode CDA diperlukan untuk menganalisis penggunaan bahasa, antara lain: (1) Bahasa memiliki fungsi serta dampak komunikasi yang beragam. Pemahaman kita terhadap fungsi bahasa akan membuat kita lebih teliti dalam memperhitungkan dampak sehingga mampu meningkatkan efektifitas dalam berkomunikasi dan menerapkan strategi wacana. (2) Berbagai fenomena bisa digambarkan dengan beragam cara oleh bahasa; variasi laporan, cerita, harfiah, fiktif, representatif atau virtual. Hal itu menunjukkan adanya kepentingan, maksud

dan tujuan. Untuk itu dibutuhkan ketajaman dalam proses penafsirannya. (3) Bahasa tidak digunakan secara transparan (langsung mengungkap maksud tulus pewicara atau peneliti) melainkan dengan retorika, manipulasi bahkan dengan penyesatan. Maka sikap kritis diperlukan untuk mempertanyakan dan mencurigai kepentingan, nilai dan tujuan tersembunyi di balik bahasa. (4) Bahasa dapat dikonstruksi atau mengkonstruksi. Bahasa dikonstruksi untuk bisa menghasilkan makna melalui penyesuaian terhadap kaidah-kaidah tata bahasanya sehingga dapat masuk ke dalam logika argumen pembenaran. Bahasa dikatakan mengkonstruksi apabila seseorang mencoba memaknai fenomena atau terlibat dalam aktivitas sosial, yaitu saat bahasa digunakan sebagai strategi kekuasaan dan saat cerita/konsep membentuk realitas.

Apabila kita telisik secara etimologi, kata *critical* (kritis) yang melekat dalam konsep CDA, sesungguhnya berasal (sumbangan) dari teori kritis yang dipelopori oleh ilmuan-ilmuan dari *Frankfurt School* yang begitu fanatik terhadap ideologi Marxisme. Dalam penelitian ilmu sosial makna kata kritis berarti membongkar tatanan kehidupan masyarakat yang diyakini terdapat ketidakadilan, diskriminasi, dominasi serta penindasan. Mereka yang “kritis” adalah mereka yang mencoba mencari akar penyebab persoalan serta menyiapkan berbagai skema perlawanan untuk mengubah dan menciptakan tatanan-tatanan kehidupan yang ingin dikehendaki. Hal tersebut, mirip sekali dengan apa yang kemudian menjadi tujuan dari CDA yaitu untuk membongkar apa yang salah dan seharusnya dalam masyarakat; apakah ketidakadilan, ketidaksetaraan, pembatasan kebebasan atau diskriminasi. Lalu dicari dan dianalisis setiap akar persoalannya, barulah kemudian menentukan bentuk perlawanan-perlawanan yang sesuai agar ketidakadilan dan situasi penindasan bisa diubah. Perlu diingat pula, berbeda dengan metode penelitian lain di mana posisi peneliti bersifat netral. Posisi peneliti dalam CDA sifatnya memihak. Maka tak heran, tujuan akhir dari CDA adalah terjadinya kemajuan ilmiah dan perubahan sosial-politik yang berarti peneliti bertindak sekaligus berperan sebagai *agent of change* atau agen sosial perubahan (Haryatmoko, 2017, hlm. vii-viii).

Terdapat beberapa teknik dalam CDA yang begitu populer antara lain model T. van Dijk, N. Fairclough dan R. Wodak (generasi pertama). Kemudian muncul

lagi tokoh-tokoh lain yang ikut mempopulerkan antara lain seperti Roger Fowler, Robert Hodge Guntur Kress, Tony Trew, Theo van Leeuwen dan Sara Mills. Di antara mereka terdapat kesamaan sekaligus perbedaan dalam mengembangkan teori dan metode CDA. Namun demikian, ada tiga postulat yang disepakati bersama. (1) Pendekatan CDA harus berorientasi ke permasalahan sosial yang harus dianalisis secara multidisipliner. (2) Fokus utama CDA adalah untuk mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan dengan menggunakan data semiotik (tulisan, lisan dan visual). (3) Dalam penelitian CDA bersifat reflektif yang berarti dilakukan tanpa harus memeriksa nilai dan ideologi peneliti (Haryatmoko, 2017, hlm. 1).

Dengan berbagai pertimbangan, dalam penelitian ini, peneliti merujuk pemikiran Norman Fairclough dari bukunya yang terkenal *Language and Power* (2003) untuk digunakan sebagai teknik analisis data dalam menguraikan narasi sejarah Aceh yang terdapat dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi, saat terjadinya konflik dan pasca perdamaian di Aceh. Tujuannya untuk bisa mengungkap nilai dan makna ideologis yang terkandung di dalam buku teks dan sekaligus mengungkap bagaimana relasi sekaligus kontestasi kekuasaan yang diskriminatif dalam menentukan dan menciptakan narasi formal buku teks yang berkaitan dengan sejarah Aceh.

3.2 Subjek Penelitian

Menurut Haryatmoko (2017, hlm. 4) dalam penelitian yang menggunakan metode CDA sumber data yang digunakan bisa berupa dokumen, kertas diskusi, perdebatan parlemen, pidato, kartun film, foto, koran, iklan maupun brosur. Senada dengan pendapat tersebut, maka subjek kajian dalam penelitian ini adalah sebuah dokumen yang berupa buku teks. Buku teks yang dimaksud adalah buku teks mata pelajaran sejarah untuk sekolah menengah atas (SMA) yang pernah diterbitkan pada tahun 1994-2013.

Kurikulum 1994 dipilih sebagai batas awal penelitian karena kurikulum ini dianggap mewakili masa Orde Baru, berada pada masa transisi penting dalam sejarah Indonesia, yaitu dari akhir era Orde Baru menuju awal Reformasi. Dengan menganalisis narasi sejarah Aceh dalam Kurikulum 1994, peneliti dapat memperoleh wawasan penting tentang bagaimana pemerintah Orde Baru saat itu

membangkitkan sejarah Aceh sebagai alat politik. Menggunakan Kurikulum 1994 sebagai batas waktu juga memungkinkan peneliti untuk lebih mudah mengevaluasi perubahan atau kesinambungan dalam penyajian narasi sejarah Aceh seiring dengan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia dari masa Orde Baru ke era Reformasi. Sementara itu, Kurikulum 2013 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena kurikulum ini merupakan produk dari era Reformasi yang ditandai dengan proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Reformasi membawa perubahan besar dalam tata kelola pendidikan, termasuk dalam cara sejarah Aceh dikonstruksikan. Dengan mempelajari narasi sejarah Aceh dalam buku teks berdasarkan Kurikulum 2013, kita dapat melihat bagaimana perubahan zaman tercermin. Selain itu, meskipun Kurikulum 2013 dan KTSP 2006 sama-sama produk era Reformasi, narasi sejarah Aceh dalam buku teks Kurikulum 2013 jauh lebih holistik dibandingkan dengan Kurikulum KTSP 2006.

Berikut ini adalah daftar buku paket yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yang diurutkan berdasarkan kurikulum dan tahun terbitnya buku tersebut yang antara lain:

Tabel 3.1
Daftar Buku Teks Pelajaran Sejarah Indonesia SMA

No	Judul Buku	Kelas	Pengarang	Tahun Terbit	Kurikulum	Penerbit
1.	Sejarah Nasional & Umum: Untuk SMU/SMK Kelas 1 Caturwulan I, II dan III	1	Kaspul Anwar & Suradji Noorwijianto	1997	Kurikulum 1994	Surabaya Intellectual Club, Surabaya
2.	Sejarah Nasional & Umum untuk SMU/SMK	2	S. Sartono, Sujito & Drs. Suroso	1995a	Kurikulum 1994	Pabelan, Surakarta
3.	Sejarah Nasional & Umum untuk SMU/SMK	3	S. Sartono, Sujito & Bambang Sugeng	1995b	Kurikulum 1994	Pabelan, Surakarta
4.	Sejarah	X	Tarunasena	2009a	Kurikulum	Pusat

	SMA/MA: Untuk Kelas X Semester 1 dan 2				2006	Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
5.	Sejarah SMA/MA: Untuk Kelas XI Semester 1 dan 2 Program IPS	XI	Tarunasena	2009b	Kurikulum 2006	Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
6.	Sejarah 3: SMA/MA Kelas XII Program IPS	XII	Matroji	2008	Kurikulum 2006	Bumi Aksara
7.	Sejarah Indonesia: SMA/MA/S MK/MAK	X	Restu Gunawan dkk.	2017	Kurikulum 2013	Puskurbuk, Kemdikbud, Jakarta
8.	Sejarah Indonesia: SMA/MA/S MK/MAK	XI Seme ster 1 (XIa)	Sardiman & Lestariningsih	2017a	Kurikulum 2013	Puskurbuk, Kemdikbud, Jakarta
9.	Sejarah Indonesia: SMA/MA/S MK/MAK	XI Seme ster 2 (XIb)	Sardiman & Lestariningsih	2017b	Kurikulum 2013	Puskurbuk, Kemdikbud, Jakarta
10.	Sejarah Indonesia: SMA/MA/S MK/MAK	XII	Abdurakhman dkk.	2015	Kurikulum 2013	Puskurbuk, Kemdikbud, Jakarta

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk memperoleh sumber data yang dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Studi dokumentasi dan arsip

Sebagai langkah awal penelitian, peneliti melakukan studi dokumentasi dan arsip dengan mencari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Pada studi dokumentasi, pencarian dikhususkan pada subjek buku-buku teks pelajaran sejarah Indonesia untuk SMA yang diterbitkan atau dijadikan rujukan dalam pembelajaran sejarah di sekolah pada masa Orde Baru dan Reformasi atau pada saat

masa konflik dan pasca perdamaian Aceh. Buku teks pelajaran sejarah yang dimaksud adalah buku teks sejarah yang diterbitkan sesuai dengan kurikulum 1994, kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Dokumen buku yang diperoleh adalah buku teks pelajaran sejarah Indonesia untuk SMA yang diterbitkan oleh pemerintah dan swasta (penerbit) dan pernah dipelajari atau dijadikan buku rujukan atau bahan ajar di sekolah-sekolah.

Agar pemaparan lebih komprehensif dan memiliki kerangka struktur yang hirarkis, penelitian ini juga memanfaatkan arsip. Arsip yang dimaksud adalah surat-surat kebijakan pemerintah (peraturan-peraturan) dan dokumen-dokumen kurikulum yang pernah dikeluarkan dan diterbitkan untuk kepentingan pembelajaran sejarah di sekolah ataupun peraturan lain yang relevan dan masih terkait dengan penelitian tesis ini. Dikatakan arsip karena sumber itu dikeluarkan sesuai dengan waktu kajian yang diteliti.

2) Studi Kepustakaan

Mengenai studi kepustakaan, hal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari buku referensi, karya akademik, jurnal yang terkait dengan masalah penelitian. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan dari berbagai peneliti dan menghindari subjektivitas penelitian. Buku referensi, karya akademik dan jurnal yang dicari adalah yang berhubungan dengan sejarah Aceh, buku teks pembelajaran sejarah, perkembangan kurikulum, metode penelitian, *critical discourse analysis* (CDA), dan tentunya buku-buku sejarah lain yang relevan dalam melihat konteks waktu atau zaman saat buku teks pembelajaran sejarah disusun.

3.4 Teknik Analisis Data

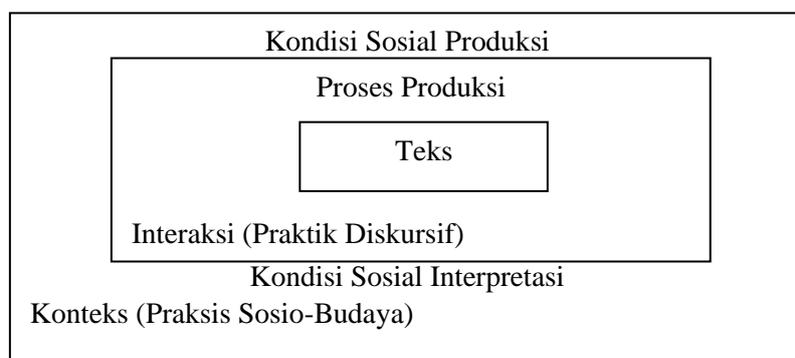
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Ada satu sumber buku rujukan utama (sumber primer) serta beberapa buku penunjang lain (sumber sekunder) yang peneliti gunakan dalam mengembangkan teknis analisis data model Fairclough. Buku rujukan utama (sumber primer) karya Fairclough yang peneliti maksudkan disini yaitu *Language and Power* (2003).

Menurut pandangan Fairclough (2003), CDA atau yang ia kenal sebagai CLS adalah sebuah metode yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa bahasa

merupakan bagian dari praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Fairclough juga ingin membuktikan tentang bagaimana relasi bahasa dan kekuasaan serta relasi bahasa dan ideologi dalam praktik-praktik sosial kehidupan sehari-hari. Bahasa yang terdapat dalam masyarakat menurutnya tidaklah bersifat netral namun memiliki kekuatan dan merupakan media untuk pencapaian suatu kekuasaan tertentu serta memiliki dan punya muatan ideologis.

Eriyanto (2017, hlm. 285) kemudian menjelaskan lebih lanjut kaitan bahasa sebagai praktik sosial sebagaimana yang dimaksudkan oleh Fairclough. Menurut pendapatnya, analisis Fairclough pada dasarnya ingin mencoba menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang bersifat makro. Maksudnya, dalam analisis wacana yang dikembangkan, Fairclough menurutnya ingin sekali membangun model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya yang tujuan akhirnya adalah mampu mengkombinasikan analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Maka dari itu, titik besar perhatian Fairclough menurutnya adalah untuk memandang bahasa sebagai praktik kekuasaan.

Jika bahasa ataupun wacana dipahami sebagai praksis sosial, dalam melakukan analisis, bagi Fairclough seseorang haruslah memasukkan gagasannya tidak hanya untuk menganalisis teks semata ataupun cukup dengan menganalisa proses produksi dan interpretasi teks, namun harus juga menganalisis hubungan antara teks, proses (interaksi), dan kondisi sosialnya (konteks); baik kondisi terdekat suatu konteks ataupun kondisi terjauh institusi dan struktur sosialnya. Untuk lebih memudahkan dalam melihat gambaran kerangka analisis yang dicetuskannya, di bawah ini adalah skema ilustrasi yang digambarkan Fairclough (2003, hlm 28) terkait relasional antara teks, interaksi dan konteks tersebut:



Gambar 3.1 Diskursus Sebagai Teks, Interaksi dan Konteks

Haryatmoko (2017, hlm. 23-24) menjelaskan lebih lanjut secara terperinci terkait dengan tiga skema yang diutarakan oleh Fairclough tersebut, antara lain:

- 1) Dimaksud teks adalah semua yang mengacu kepada wicara, tulisan, grafik, dan kombinasi-kombinasinya ataupun segala bentuk linguistik teks (khasanah kata, gramatika, *syntax*, struktur metafora, retorika). Dalam analisis teks, hal yang mendasar untuk dianalisis menurutnya adalah tentang pembendaharaan kata serta penggunaan istilah (metafora) karena keduanya akan mengacu ke makna atau tindakan tertentu. Soal pembendaharaan kata meliputi makna kata; satu kata bisa memiliki banyak makna dan berbeda makna tergantung dari konteksnya. Sedangkan maksud dari penggunaan istilah, yaitu memudahkan inti kelompok pembaca mengidentifikasi diri dengan penulis dan segera menetapkan *trust* di dalam opininya.
- 2) Interaksi atau yang disebut sebagai praktik diskursif adalah semua bentuk yang berkaitan dengan masalah produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini telah ada yang namanya proses interpretasi yaitu mengaitkan antara produksi teks dengan konsumsi teks. Pusat perhatiannya diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan *genre* yang ada dengan melihat bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan dalam struktur sosial yang ada dan saling berkaitan. Praktek analisis diskursif ini sesungguhnya juga ingin melihat kekuatan pernyataan sejauh mana dapat mendorong tindakan ataupun kekuatan afirmatifnya. Intertekstualitas pada tahapan ini juga telah mendapatkan perhatian khusus dalam menganalisa sebuah wacana walaupun belum dominan.
- 3) Konteks atau yang disebut sebagai praksis sosio-budaya. Dalam tahapan ini telah masuk pemahaman intertekstualitas dimana terlihat bahwasanya teks terbentuk oleh dan membentuk praksis sosial. Praksis sosial sendiri ingin menggambarkan bagian aktivitas sosial dalam praksis. Misalnya menjalankan profesi sebagai guru atau dosen, selalu menggunakan bahasa khusus. Demikian halnya dengan politisi terdapat kode sosial khusus dalam bahasa yang dimainkannya. Suatu wacana selalu berkelindan dengan tingkatan-tingkatannya, dalam situasi langsung, dalam institusi atau organisasi yang lebih luas, dan pada tingkat masyarakat.

Berdasarkan model skema analisis wacana yang dikemukakan oleh Fairclough yaitu teks, interaksi (praktik diskursif) dan konteks (praksis sosial) sebagaimana yang tadi telah dijelaskan secara konseptual. Selanjutnya peneliti menyusun beberapa langkah operasional penelitian yang langsung berkaitan dengan tema penelitian yaitu tentang analisis narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia saat Orde Baru dan Reformasi, khususnya saat konflik dan pasca perdamaian di Aceh. Dengan mengikuti skema yang telah diberikan oleh Fairclough maka rancangan operasional penelitiannya (kerangka analisis) adalah sebagai berikut:

Pertama, soal teks. Pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia yang nantinya akan dijadikan subjek penelitian, teks-teks atau narasi-narasi yang berkaitan dengan sejarah Aceh akan diperiksa secara linguistik dengan melihat pokok-pokok bahasan, sub-pokok bahasan, paragraf, tata kalimat dan kosa kata yang digunakan didalam buku teks. Pemeriksaan elemen-elemen tersebut sesungguhnya ingin mengungkap dan melihat: (1) Bentuk representasi, yaitu tentang sejarah seperti apa yang ingin disampaikan di dalam teks yang biasanya punya nilai, muatan dan kepentingan ideologis. Pemeriksaan representatif ini secara teknis akan mengecek soal bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan atau apapun yang ditampilkan dan digambarkan dalam buku teks sejarah Indonesia mengenai sejarah Aceh. (2) Relasi, yaitu merujuk pada analisis bagaimana hubungan antara pengarang dengan khalayak. Khalayak dalam konteks buku teks sejarah Indonesia ini bisa ditafsirkan antara lain pemerintah, perancang kurikulum (konseptor narasi), masyarakat, guru dan peserta didik (konsumen narasi). Dalam konsep relasi, di sini juga membahas soal apakah narasi sejarah Aceh di dalam buku teks dikonstruksikan secara formal (*official history*) atau informal (*unofficial history*), secara terbuka apa adanya atautkah malah tertutup (dilakukan proses penyensoran narasi sejarah). Konsep ini nantinya akan membahas bagaimana relasi antara negara dan kurikulum, lebih khususnya antara negara (kekuasaan) dengan buku teks. (3) Identitas, yaitu melihat *positioning* pengarang dalam menampilkan dan mengkonstruksikan narasi buku teks. Dengan adanya *positioning* ini, akan terungkap di mana posisi penulis buku teks menempatkan dan mengidentifikasikan dirinya terhadap peristiwa sejarah Aceh dalam konstelasi penulisan sejarah nasional Indonesia. *Positioning*

ini juga ingin melihat bentuk memori kolektif (kesan) yang seperti apa yang ingin diciptakan dan ditinggalkan oleh pengarang kepada khalayak termasuk di antaranya konsumen buku teks sebagai *user* utamanya.

Dalam narasi sejarah Aceh kita mengetahui terdapat beberapa peristiwa sejarah yang termasuk kategori *difficult history* (sejarah yang sulit). Dalam terjadinya peristiwa konflik antara pemerintah Indonesia dengan gerakan DI/TII ataupun GAM misalnya. Bagaimana sesungguhnya posisi pengarang mengidentifikasikan dirinya dalam peristiwa tersebut? apakah dalam posisi yang mandiri (netral), menjadi bagian dari kelompok DI/TII ataupun GAM, ataukah bagian dari pemerintah Indonesia yang tentunya tidak menyetujui adanya pemberontakan tersebut. Dengan adanya *positioning* tersebut, nantinya kita akan mengetahui kesan sejarah seperti apa yang ingin diciptakan dan ditinggalkan oleh pengarang.

Kedua, interaksi (praktik diskursif). Dalam konsep ini, titik perhatian utama yang akan dikupas adalah soal bagaimana narasi sejarah Aceh diproduksi dan dikonsumsi. Perlu diketahui, faktor individu dan profesionalitas yang melekat pada diri pengarang buku teks memainkan peran penting dalam hal pembentukan wacana. Faktor ini meliputi latar belakang pendidikannya, pengalaman, orientasi politik dan ekonomi serta pemahaman mereka terhadap materi dan nilai yang dinarasikan. Tak lupa, struktur organisasi tempat di mana pengarang berhimpun dan berinteraksi juga ikut mempengaruhi narasi yang dihasilkannya. Banyak individu, kelompok dan organisasi-organisasi (formal dan informal) yang terlibat dalam penyusunan buku teks tentunya akan membawa berbagai idealisme yang berupa nilai, ideologi termasuk juga kepentingan-kepentingan. Tarik menarik serta pertarungan antara berbagai nilai, ideologi dan kepentingan dibawa tersebut akan menjadi temuan menarik apabila dapat diungkap dalam penelitian ini.

Selain hal itu, dalam penulisan-penulisan buku-buku ilmiah seorang pengarang pada umumnya bisa bertindak secara otonom dalam menentukan apa yang ingin dituliskan di dalam karya yang dihasilkannya. Namun dalam penulisan buku teks, hal itu berbeda sama sekali. Seorang pengarang harus taat terhadap kaidah-kaidah yang telah dibakukan dalam pedoman penulisan buku teks. Termasuk nilai-nilai apa yang harus dimunculkan. Dalam proses penyusunan buku

teks, *term of reference* telah digariskan oleh struktur-struktur kekuasaan yang membidangi sehingga narasi-narasi yang dibangun tidak akan lepas dari narasi kekuasaan sehingga narasi sejarah yang dihasilkan umumnya akan bersifat *official history*. Peraturan terbaru yang secara khusus mengatur tentang buku teks secara umum adalah Permendikbud No. 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Ketiga, yaitu soal konteks (praksis sosio-budaya). Analisis ini menekankan soal bagaimana konteks sosial yang berkembang di luar buku teks ikut mempengaruhi bentuk konstruksi narasi sejarah Indonesia, khususnya narasi tentang sejarah Aceh. Praksis sosio-budaya memang tidak langsung berhubungan dengan bagaimana teks diproduksi, namun ia sangat menentukan tentang bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Kita dapat mencontohkan misalnya tentang mengapa narasi sejarah Indonesia pada masa Orde Baru memiliki kecenderungan yang bersifat militeristik dan patriotik? Mengapa pada era reformasi, pasca lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto terjadi orkestrasi kebebasan penulisan sejarah yang sangat demokratis? Nilai dan ideologi yang terjadi saat itu sesungguhnya telah mewakili jiwa zaman yang tumbuh dalam masyarakat. Artinya konteks sosial yang militeristik dan demokratis yang berkembang saat itu, telah berperan dalam membentuk narasi pada buku teks.

Hal demikianlah seharusnya juga terjadi dalam narasi sejarah Aceh yang terdapat di dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia. Perubahan politik yang terjadi secara nasional, dari Orde Baru ke Reformasi, dari konflik ke perdamaian, pastinya akan ikut mempengaruhi tentang bagaimana narasi sejarah Aceh yang dikonstruksikan. Dalam buku teks sejarah Indonesia seharusnya muncul narasi jalan tengah untuk menjembatani pihak-pihak yang bertikai untuk tidak saling menyalahkan pasca perdamaian sehingga sejarah nantinya bukan lagi menjadi beban masa lalu namun ikut menguatkan terjadinya proses integrasi nasional baik dalam skala politik, sosial dan budaya.

Fairclough sebagaimana yang diuraikan dalam Eriyanto (2017, hlm. 322) sesungguhnya telah membuat tiga level analisis pada tahap praksis sosio-budaya yaitu situasional, institusional dan sosial. (1) Situasional, berkaitan dengan soal bagaimana teks diproduksi. Maksudnya teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau

suasana yang khas, unik, sehingga suatu teks bisa jadi sangat berbeda dengan teks lainnya. Jika wacana dipahami sebagai suatu wujud tindakan maka teks merupakan wujud konkret dari manifestasi tindakan dalam rangka merespon situasi dan konteks sosial yang terjadi saat itu. (2) *Institusional*, yaitu melihat bagaimana pengaruh institusi dalam praktik produksi wacana. Ini bisa berasal dari internal penerbit ataupun dari kekuatan-kekuatan eksternal diluar penerbit yang menentukan bagaimana bentuk dari sebuah teks. Praktisnya, dalam penerbitan buku teks, institusi politik merupakan faktor penting dalam mempengaruhi bentuk narasi buku teks. Misalnya, institusi negara yang bisa menentukan, mengendalikan, mengontrol bagaimana standar isi narasi buku teks hingga pendistribusian buku teks. (3) *Sosial*, yaitu soal di mana budaya masyarakat ikut memberikan pengaruh terhadap bagaimana bentuk dari wacana. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa wacana yang muncul dalam buku teks ditentukan oleh perubahan masyarakat. Jika aspek situasional tadi lebih mengarah kepada yang mikro (konteks peristiwa saat teks dibuat) sedangkan aspek sosial lebih melihat kepada hal yang lebih makro seperti sistem politik, sistem ekonomi dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem-sistem tersebut pada akhirnya akan menentukan siapa yang berkuasa dan nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat.

Agar rancangan operasional penelitian tersebut semakin jelas, mudah dimengerti dan juga diterapkan dalam mengkaji buku teks sejarah Indonesia Kurikulum 1994, Kurikulum KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. Peneliti kemudian melakukan pengembangan dan menyusun beberapa indikator-indikator penelitian yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang akan dikaji pada subjek penelitian. Adapun indikator-indikator penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Penelitian

Teks (Subjek Penelitian; Buku Teks Pembelajaran Sejarah Kurikulum 1994, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013)			Interaksi (Praktik Diskursif)	Konteks (Praksis Sosial- Budaya)
Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Narasi Sejarah Aceh		
1. Perkembangan Kehidupan Awal Masyarakat Indonesia pada Masa Praaksara dan Masa Aksara. 2. Masuknya Agama Hindu-Budha, Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha dan Peninggalan-Peninggalan Kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia. 3. Kedatangan Islam, Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam, Akulturasi dan Peninggalan-Peninggalan Kebudayaan Islam di Indonesia. 4. Kedatangan Bangsa Barat, Lahirnya Kolonialisme dan Imperialisme, Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme serta Dampak Kolonialisme dan Imperialisme Terhadap Kehidupan		1. Mengidentifikasi beberapa pokok bahasan, sub pokok bahasan, paragraf, kalimat dan kosa kata dalam buku teks sejarah Indonesia yang berkaitan dengan narasi sejarah Aceh (peristiwa, tempat kejadian, waktu kejadian dan tokoh yang terlibat). 2. Menganalisis bentuk representasi sejarah berupa nilai dan kepentingan yang ingin disampaikan di dalam narasi sejarah Aceh pada buku teks pembelajaran sejarah Indonesia. 3. Menganalisis bentuk relasi yang terjadi antara penyusun narasi sejarah Aceh (pengarang) atau buku teks sejarah Indonesia dengan pemerintah (kekuasaan), antara kurikulum dan kekuasaan, serta antara kekuasaan dengan buku teks. 4. Menganalisis bagaimana bentuk	1. Menganalisis bagaimana proses narasi sejarah Aceh diproduksi dan dikonsumsi. 2. Menganalisis keterkaitan individu dan profesionalitas pengarang buku teks seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, orientasi politik dan ekonomi, serta pemahaman mereka terhadap materi dan nilai yang dinarasikan terhadap pembentukan wacana pada buku teks.	1. Menganalisis faktor-faktor situasional (konteks sosial-politik) yang berkembang di luar buku teks dalam mempengaruhi bentuk konstruksi narasi sejarah Indonesia, khususnya narasi tentang sejarah Aceh. 2. Menganalisis pengaruh institusi internal (penerbit) ataupun kekuatan-kekuatan eksternal diluar penerbit (pemerintah) dalam menentukan bagaimana bentuk dari narasi sejarah Indonesia, khususnya narasi tentang sejarah Aceh. 3. Menganalisis pengaruh sosial-budaya masyarakat terhadap bentuk dari

<p>Bangsa Indonesia.</p> <p>5. Zaman Pergerakan Nasional di Indonesia (1908-1942).</p> <p>6. Kedatangan, Penjajahan dan Perlawanan Terhadap Jepang di Indonesia (1942-1945).</p> <p>7. Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta Upaya-Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia</p> <p>8. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959).</p> <p>9. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).</p> <p>10. Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998).</p> <p>11. Indonesia pada Masa Reformasi (1998-sekarang)</p>	<p>identitas atau <i>positioning</i> pengarang dalam menampilkan dan mengkonstruksikan narasi sejarah Aceh pada buku teks sejarah Indonesia.</p>		<p>narasi sejarah Indonesia, khususnya narasi tentang sejarah Aceh.</p>
---	--	--	---